

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

# ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA DALAM PENGAWASAN ALAT PENYEBERANGAN KEMPANG DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Studi di Kecamatan Rangsang Barat)

Oleh :

**AHMAD KHAIRI**  
**NIM. 11375104819**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada bulan Mei 2017 hingga Agustus 2017. Adapun ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam mengawasi penyebrangan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan kuisioner. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 364 orang diambil dari pegawai dinas perhubungan, masyarakat serta beberapa orang pemilik kempang, jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 92 orang. Sedangkan jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dari hasil rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indikator, maka dapat dinyatakan bahwa analisis tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan pengawasan penyebrangan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti (studi kasus di kecamatan rangsang barat) tidak baik dengan kisaran nilai 52,39% adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan penyebrangan kempang di kabupaten kepulauan meranti antara lain: kurang adanya forum komunikasi, kurangnya sarana dan prasarana, belum adanya keseriusan pihak dinas perhubungan dalam melaksanakan pengawasan, serta minimnya anggaran.

*Keyword: Tugas Pokok, Pengawasan, Transportasi*